

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah meletakkan pondasi otonomi secara meluas kepada Daerah Kabupaten maupun Kota dalam mengekspresikan kembali potensi pembangunan yang dimiliki. Sistem sentralistis yang melahirkan pola kesamaan pada berbagai bidang pembangunan yang terjadi selama ini, telah banyak menghambat laju pembangunan pada daerah sehingga menyebabkan daerah mengalami hambatan dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menitik beratkan pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan daerah untuk mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat dalam menerapkan kebijakannya.

Daerah Kabupaten/Kota diharapkan akan menjadi ujung tombak dalam mengukur keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah agar dapat berhasil dalam mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani.

Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus-menerus agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu, sebagai pelayan publik kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel. Apabila publik dapat terlayani dengan baik oleh aparatur birokrasi, maka dengan sendirinya aparatur birokrasi mampu menempatkan posisi dan kedudukannya yaitu sebagai *public service*. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja dari aparatur

birokrasi yang sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal ini yang akan menjadikan negara yang maju dalam hal pelayanan kepada warganya dan melahirkan pada terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka Kota Bandar Lampung sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung menetapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah daerah di Kota Bandar Lampung yang menangani masalah ketenagakerjaan melalui pelayanan yang dilakukan oleh birokrasinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah:

1. Pembuatan kartu angkatan kerja (AK/I) sebagai kartu tanda pencari kerja
2. Pembuatan kartu angkatan kerja (AK/II) sebagai kartu induk pencari kerja
3. Pembuatan kartu angkatan kerja (AK/IV) sebagai kartu panggilan pencari kerja
4. Pembuatan kartu angkatan kerja (AK/V) sebagai surat pengantar untuk mengisi lowongan suatu pekerjaan.

Pembuatan kartu pencari kerja (AK/I) adalah sebagai tanda pendaftaran, kartu identitas, dapat juga digunakan sebagai lampiran permohonan (berlaku untuk melamar pekerjaan). Khususnya untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kartu pencari kerja (AK/I) merupakan salah satu syarat utama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan juga untuk pendaftaran lowongan kerja di beberapa perusahaan swasta.

Setiap harinya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung melayani pemohon kartu pencari kerja (AK/I) antara 10 sampai 20 orang pemohon. Kantor Dinas Tenaga Kerja biasanya akan padat dikunjungi pencari kerja pada saat pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil, petugas dapat melayani pemohon sampai ratusan pencari kerja yang ingin membuat kartu pencari kerja (AK/I). Berikut dapat di lihat tabel informasi untuk melihat banyaknya pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja (AK/I) di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2008/2009.

Tabel. 1. Pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja (AK/I) berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2008/2009.

NO	Tingkat Pendidikan	Tahun 2008			Tahun 2009		
		LK	Prm	Jml	LK	Prm	Jml
1	SD	57	22	79	8	2	10
2	SLTP	128	35	163	72	16	88
3	SLTA	3.009	2.093	5.102	2.480	1.056	3.536
4	DI, DII, DIII	396	727	1.123	146	259	405
5	SARJANA (S1+)	1.078	1.338	2.416	464	547	1.011
<b>JUMLAH</b>		<b>4.668</b>	<b>4.215</b>	<b>8.883</b>	<b>3.170</b>	<b>1.880</b>	<b>5.050</b>

Sumber; Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Tahun 2009

Melihat dari tabel pencari kerja di atas, banyaknya pencari kerja yang membuat kartu pencari kerja (AK/I) dari tingkat pendidikan SD sampai dengan Sarjana (S1+), menuntut Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai. Jika pelayanan yang diberikan tidak baik sebagai pihak yang dilayani maka masyarakat tidak akan merasakan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil pra riset menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK/I) masih kurang, seperti komputer dan alat pendukung lainnya seperti mesin fotokopi, agar pelaksanaan yang dilakukan dalam pelayanan dapat lebih cepat dan efisien. Selain itu kurangnya sosialisasi aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam memberikan

informasi mengenai prosedur pelayanan dalam pembuatan kartu pencari kerja (AK/I).

Sebagai organisasi pemerintah yang menangani masalah ketenagakerjaan, sudah selayaknya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung senantiasa mengupayakan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK/I) untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Keberhasilan pemerintah ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara negara, termasuk didalamnya adalah aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang esensinya adalah penyelenggara fungsi pelayanan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui “Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK/I) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan “Bagaimana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK/I) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK/I).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menambah khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK/I).